



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Deskriptif Informan

1. Kondisi Objektif

Yang dimaksudkan dengan kondisi objektif disini adalah paparan data yang berhubungan dengan informasi terkait informan dalam penelitian ini. Informasi terkait informan yang dipaparkan antara lain identitas, fakultas dan jurusan tempat informan terdaftar sebagai mahasiswa, identitas istri/suami dari informan, serta tanggal pernikahan informan diselenggarakan.

Data ini penting dijelaskan untuk semakin menguatkan validitas dari penelitian yang dilakukan. Lebih detailnya informasi terkait tiga informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa/ Umur	Fakultas/ Jurusan/ Semester	Nama pasangan (suami/istri)/ Umur/status	Asal	Tanggal pernikahan
1	LQ/ 22tahun	Tarbiyah / Pendidikan IPS / 7 (tujuh)	ML / 23tahun / Ponpes Al- Hikam semester 8	Bondowoso	17 Mei 2011
2	Nur Halimah	Tarbiyah / PAI / 7 (tujuh)	Fakhrurrozi / 27tahun/ pengajar ponpes, SMP, bisnis	Bangkalan	<i>Nikah Sirri :</i> 2 Desember 2011 <i>Resmi :</i> 7 Juli 2013
3	AU/23tahun	Syariah / Al- ahwal Al- syakhsiyyah / 7 (tujuh)	Muafiyah / 17tahun / pelajar kelas XII MA	Lamongan	17 Oktober 2013

2. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan yang dimaksud disini adalah penjelasan tentang pemahaman keagamaan informan, baik yang dipengaruhi oleh pendidikan yang pernah ditempuh oleh informan, maupun pemahaman keagamaan di keluarga serta di lingkungan sosial informan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, menunjukkan pemahaman keagamaan informan dalam hal kehidupan berumah tangga, terutama tanggung jawab membimbing pasangan dalam hal keimanan dan ketakwaan dapat dipahami dengan baik, termasuk juga pengetahuan tentang kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan sebagai suami/istri.

Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari pendidikan yang pernah ditempuh oleh informan, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. LQ merupakan lulusan dari Pondok Pesantren (selanjutnya disingkat Ponpes) Nurul Jadid Paiton sekaligus pendidikan formal di Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Jadid tersebut, sedangkan suaminya, ML hanya menempuh pendidikan non-formal yakni Ponpes di daerah Madura, hingga sekarang sedang menempuh pendidikan di Ponpes Al-Hikam Malang semester 8.
2. Nur Halimah dan Fakhurrozi merupakan lulusan dari ponpes yang sama di Ponpes Mambaul Ulum Batang-batang Pamekasan, sekaligus menempuh pendidikan formalnya di Madrasah Aliyah (MA) Mambaul Ulum tersebut.
3. AU merupakan lulusan MA Tarbiyatut Tholabah Kabupaten Lamongan, sekaligus mengikuti pendidikan non-formalnya. Sedangkan istrinya sekarang sedang menempuh pendidikan formal di Darul Fiqh, Kabupaten Lamongan.

Tentunya pendidikan formal maupun non-formal yang pernah ditempuh para informan ini turut mempengaruhi pemahaman keagamaan, khususnya dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya.

Sedangkan keluarga maupun lingkungan sosial para informan, pada umumnya pemahaman maupun penerapan pengetahuan keagamaannya cukup baik, hal ini juga dikarenakan rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat sekitar tempat tinggal para informan, maupun keluarganya yakni menempuh pendidikan non-formal di ponpes-ponpes, sekaligus menempuh pendidikan formalnya.

B. Analisis Data

1. Isi Perjanjian Perkawinan yang Dilakukan Mahasiswa UIN Maliki Malang

Pembahasan mengenai perjanjian perkawinan dalam kitab-kitab fiqh menggunakan istilah persyaratan dalam perkawinan. Sedangkan hubungan antara perjanjian dan persyaratan dalam perkawinan yakni dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, persyaratan perkawinan yang dimaksudkan ini adalah persyaratan yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu perkawinan. Perjanjian dalam bentuk syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu akad inilah yang kemudian dilakukan dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa perjanjian yang disepakati dalam perkawinan tiga mahasiswa UIN Maliki yang ditetapkan sebagai informan tersebut, yang keseluruhannya memiliki perbedaan maupun kemiripan tersendiri. Isi dari perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh informan antara lain :

- a. Penangguhan untuk berhubungan intim suami-istri.
- b. Penangguhan pemberian nafkah kepada istri, sehingga pembiayaan hidup masih dibiayai oleh orang tua masing-masing.
- c. Penangguhan untuk tinggal serumah.
- d. Penundaan hamil/memiliki keturunan

Perjanjian-perjanjian perkawinan tersebut diungkapkan ketika peneliti mewawancarai dan bertanya tentang perjanjian apa yang disepakati dalam perkawinan para informan, yang kemudian diperoleh data sebagai berikut :

“Iya ada, perjanjiannya itu belum boleh berhubungan dulu, sama belum dinafkahi”¹

“Janjinya itu belum tinggal serumah, belum berhubungan dulu, ya semacam penangguhan untuk dukhul gitu”²

“Bojo ku (suamiku) kan belum kerja, jadi khususnya biaya pendidikan itu masih ditanggung sama orang tua. Terus kalau uang makan dan sehari-hari itu, kan sebelumnya belum kerja, tapi masih pancet (tetap) minta ke orang tua gitu lo, semua biaya masih orang tua masing-masing. Biaya pendidikan maupun biaya makannya. Suamiku dibiayai orang tuanya, aku ya masih orang tua ku juga. Terus yang kedua itu, janji gag boleh terlalu cepat punya anak.”³

Adapun latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut dikarenakan beberapa kondisi yang menurut masing-masing keluarga perlu untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, diantaranya yaitu kondisi ekonomi suami yang belum memiliki pekerjaan, sehingga belum memiliki penghasilan untuk menafkahi istri, bahkan masih berstatuskan sebagai mahasiswa. Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“Alasannya ya karena permasalahannya kan saya belum punya pekerjaan dan masih sekolah (kuliah), makanya dibuat perjanjian kayak gitu.”⁴

Sedangkan, kondisi yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian dalam hal keturunan dikarenakan orang tua yang mengkhawatirkan kuliah anaknya akan terganggu, dikarenakan tidak dapat lagi terfokus pada pendidikannya, tetapi sudah

¹ AU, wawancara (Malang, 24 Desember 2013).

² Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

³ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

⁴ AU, wawancara (Malang, 18 Januari 2014).

memiliki tanggung jawab lain untuk mengurus anak, sebagaimana dikatakan bahwa :

“Gag boleh terlalu cepat punya anak dulu, soalnya kan bapakku itu mengutamakan pendidikan”⁵

Adapun dibuatnya perjanjian perkawinan untuk tidak boleh tinggal serumah dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan masih pernikahan *sirri*, sehingga apabila setelah akad tersebut langsung tinggal serumah akan menimbulkan penilaian negatif di lingkungan karena belum diadakannya publikasi dalam bentuk walimah al-urs. Hal ini sebagaimana dikatakan :

“pokoknya sebelum resepsi itu aslinya gag boleh tinggal serumah gitu. Alasannya karena melihat di desa kan yang menilai masyarakat, kan gag enak gitu kalau belum resepsi udah tinggal serumah”⁶

Sedangkan kondisi yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri oleh informan dikatakan bahwa :

“Buat perjanjian kayak gitu supaya pas setelah resepsi itu tidak terasa sudah lama kalau berhubungannya gitu lo mbak”⁷

Selain itu, alasan lainnya yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian perkawinan untuk penangguhan dalam berhubungan suami-istri juga dikarenakan pernikahan yang dilakukan masih pernikahan *sirri* sehingga belum diperbolehkan menggauli istrinya. Hal ini sebagaimana diperoleh keterangan sebagai berikut :

⁵ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

⁶ Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

⁷ Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

*“Aslinya kan gag ada perjanjian kayak gitu, tapi kan keluarganya Fiyah (istrinya) meminta buat perjanjian kayak gitu, soalnya kan nikahnya masih sirri, selain itu juga mungkin karena istri saya masih 17 tahun gitu, masih sekolah.”*⁸

Namun, menurut hukum Islam, pernikahan yang *sirri* tidak dapat membatasi hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dikarenakan nikah *sirri* juga merupakan perkawinan yang sah, sebab telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam, hanya saja masih disembunyikan dan belum dipublikasikan⁹.

Syarat-syarat dalam suatu perjanjian harus sesuai dengan perintah syariat, hal ini merupakan kaidah umum dalam membentuk suatu perjanjian. Khususnya dalam perjanjian perkawinan, syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan diklasifikasikan kedalam tiga macam berdasarkan konsep fiqh, yaitu :

- a. Perjanjian yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan.
- b. Perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan maupun perintah syari’at, atau bahkan yang secara khusus dilarang untuk dilakukan oleh nash.
- c. Perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun juga tidak ada tuntunan dari syara’ untuk dilakukan.

⁸ AU, wawancara (Malang : 24 Desember 2013).

⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 345 dan 350.

Apabila keempat isi perjanjian yang dilakukan dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki tersebut dihubungkan dengan tiga macam pengklasifikasian perjanjian berdasarkan isinya dalam konsep fiqh diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang isinya tergolong sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hakikat dari perkawinan, diantaranya : perjanjian penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan nafkah serta perjanjian untuk pengguhan tinggal serumah antara suami istri.
- b. Perjanjian yang isinya tergolong sebagai perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangannya secara khusus, serta tidak ada tuntutan syara' untuk harus melakukannya, yaitu perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan (hamil).

Perjanjian tentang penangguhan berhubungan intim suami istri dan nafkah digolongkan sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan itu sendiri, dikarenakan dalam fiqh para ulama sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami yang didasarkan pada firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*”Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (anak dan ibu/istri) dengan cara yang patut.”*¹⁰

Hal ini merupakan kewajiban bagi suami, ketika sang istri telah menyerahkan dirinya untuk dinikmati, sehingga keduanya dapat saling menikmati.

¹⁰ QS. al-Baqarah (2) : 233. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 37.

Adapun perjanjian perkawinan untuk penangguhan dalam berhubungan suami istri digolongkan sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hakikat dari perkawinan, dikarenakan persetubuhan merupakan kewajiban bersama antara suami istri, juga dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah hakikat dari suatu perkawinan itu sendiri adalah bersetubuh. Hal ini didasarkan pada firman Allah :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ

“dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela”¹¹

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.”¹²

Sedangkan, perjanjian untuk tidak tinggal serumah juga merupakan perjanjian yang bertentangan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh syari'at, berdasarkan firman Allah :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”¹³

¹¹ QS. Al-Mu'minûn (23) : 5-6. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 342.

¹² QS. Al-Baqarah (2) : 223. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 35.

¹³ QS. Ath-Thalaq (65) : 6. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 559.

Kewajiban istri untuk tinggal dan menetap dirumah suaminya ini disebutkan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah.¹⁴

Selain itu, perjanjian yang isinya penundaan memiliki keturunan tergolong sebagai perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangannya secara khusus, serta tidak ada nash yang menjelaskannya. Hal ini dikarenakan hakikat perkawinan dalam persoalan ini adalah memiliki keturunan untuk meneruskan silsilah keluarga, sedangkan yang dimaksudkan dalam perjanjian yang disepakati dalam perkawinan informan tersebut bukan melarang untuk memiliki anak atau bersepakat untuk tidak memiliki keturunan, akan tetapi hanya bersepakat untuk menunda kehamilan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Perihal menunda untuk memiliki keturunan ini sama halnya dengan pembahasan hukum menggunakan program Keluarga berencana (KB). Para ulama membedakan antara *tanzhim an-nasl* (merencanakan atau pengaturan keturunan) dan *tahdid an-nasl* (memutus keturunan, pemandulan)¹⁵. Berdasarkan perbedaan ini ulama sepakat bahwa *tanzhim an-nasl* hukumnya mubah, hal ini dikarenakan tujuan yang ingin dicapai dalam *tanzhim an-nasl* sebagai suatu usaha pengaturan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Adapun, hukum dari *tahdid an-nasl* adalah haram dikarenakan merupakan upaya pemandulan dan pembatasan keturunan. Sedangkan dalam Islam dianjurkan untuk memiliki banyak keturunan.

¹⁴ Lihal Sabiq, *Fiqhus*, h. 56.

¹⁵ <http://www.dakwatuna.com/2013/02/27/28550/hukum-kb-jika-untuk-merencanakan-keturunan-maka-mubah-jika-untuk-memutuskan-keturunan-maka-haram/#ixzz2r9TT3zjc> diakses tanggal 23 Januari 2014.

Apabila perjanjian untuk menunda memiliki keturunan ini dihubungkan dengan konsep *tanzhim an-nasl* dan *tahdid an-nasl* tersebut, maka perjanjian ini tergolong sebagai *tanzhim an-nasl* yang bertujuan untuk mengatur, bukan membatasi atau upaya pemandulan.

Akan tetapi, isi perjanjian dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki yang disepakati tersebut pada umumnya dibuat atas dasar inisiatif dari keluarga masing-masing. Hal ini sebagaimana dalam keterangan bahwa :

*“Perjanjian itu dibuat sama orang tuaku, tapi semua secara lisan.”*¹⁶

*“Yang buat gitu ya dari keluarganya dia sama keluargaku, dua-duanya dari keduabelah pihak keluarga. Kalau yang nafkah itu keluargaku, kalau yang berhubungan itu keluarganya Fiyah (istrinya).”*¹⁷

*“Kalau yang belum tinggal serumah itu memang inisiatif dari keluarga, memang belum boleh. Tapi, kalau yang soal dukhul memang kesepakatan berdua.”*¹⁸

Namun, yang perlu juga untuk diketahui adalah perihal kapan perjanjian perkawinan tersebut dibuat dan disepakati. Hal ini dikarenakan sebagaimana pengertian perjanjian yang disebutkan oleh Abdurrahman Gahazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat bahwa perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan

¹⁶ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

¹⁷ AU, wawancara (Malang : 24 Desember 2013).

¹⁸ Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

dilangsungkan. Artinya bahwa disebut perjanjian perkawinan ketika perjanjian itu dibuat pada waktu atau sebelum akad perkawinan dilangsungkan.

Adapun menurut hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa :

*“perjanjian itu dibuat setelah akad nikah, karena waktu sudah tunangan itu gag ada waktu membicarakan yang gitu-gitu”*¹⁹

*“perjanjian itu dibuat waktu omong-omongan (pembicaraan) antara keluargaku sama keluarganya Fiyah sebelum nikah”*²⁰

*“sebelum nikah. Waktu itu kan yang datang kumpul orang tua masing-masing, orang tua ku dan orang tua dia juga untuk membicarakan itu.”*²¹

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa perjanjian dalam perkawinan informan disepakati sebelum akad, bahkan ada yang setelah akad dilangsungkan.

Dalam hal ini oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm dikatakan bahwa pernikahan telah mengikat sejak berlangsungnya akad tanpa dilahirkan oleh suatu syarat apapun lainnya, karena bersifat mutlak (lazim)²². Artinya bahwa, syarat yang dilahirkan atau dibuat setelah akad nikah yang lazim, maka syarat tersebut tidak ternilai. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan menyusul (setelah akad nikah)²³.

¹⁹ Halimah, wawancara (Malang, 18 Januari 2014).

²⁰ AU, wawancara (Malang : 24 Desember 2013).

²¹ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

²² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Muhammad bin YAsir Abdul Muthalib, Jilid II (Cet III; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 379.

²³ www.konsultasisyariah.com/hukum-mengajukan-syarat-ketika-nikah-/ tanggal 26 Maret 2014

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, isi perjanjian perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki tersebut tidak ada aturannya secara tekstual, terperinci dan spesifik. Akan tetapi dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya memberikan batasan secara umum, yakni perjanjian perkawinan tersebut harus tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Sejalan dengan pembatasan secara umum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, dalam KHI Pasal 45 ayat (2) juga disebutkan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Oleh karena itu, isi perjanjian perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki tersebut apabila dilihat dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia sah untuk dilakukan, karena berdasarkan hukum diperbolehkan. Akan tetapi, isi dari perjanjian itu yang perlu dikritisi kembali, karena ini berkaitan dengan boleh tidaknya perjanjian tersebut menurut konsep fiqh, maupun berkaitan dengan hukum pemenuhannya suatu perjanjian perkawinan. Pembahasan ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

2. Penerapan Perjanjian-Perjanjian Perkawinan yang Telah Disepakati dalam Perkawinan Mahasiswa UIN Maliki Malang

Pada umumnya setiap perjanjian yang dibuat oleh seseorang maka diperintahkan untuk menepatinya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an surat al-Mâ'idah ayat 3, akan tetapi kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut menjadi layak atau tidak untuk dipenuhi, salah satunya adalah syarat bahwa perjanjian yang dibuat tidak menyalahi atau

bertentangan dengan hukum syari'at²⁴. Ini merupakan prinsip umum yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian yang dibuat, tidak terkecuali didalamnya mengenai perjanjian yang dibuat dalam suatu perkawinan.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukum asalnya adalah mubah, artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh juga untuk tidak membuatnya²⁵. Namun, dalam implikasi penerapannya oleh Khatthabi disebutkan bahwa ada perjanjian yang wajib ditepati dan ada yang tidak perlu ditepati.

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam penelitian yang dilakukan diperoleh empat macam isi perjanjian dalam perkawinan mahasiswa di UIN Maliki yang menjadi informan, yang dalam penerapan perjanjian tersebut memiliki fakta masing-masing. Oleh karena itu dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis lebih rinci berdasarkan empat isi perjanjian perkawinan tersebut yang dibahas dalam tiap sub bab pembahasan.

a. Perjanjian Perkawinan berupa Penangguhan Berhubungan Suami Istri dalam Kehidupan Berumah Tangga

Perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholizhon*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut ulama Hanafiyah, nikah arti hakikinya ialah *wat'un* (setubuh) sedangkan arti majazinya adalah akad. Yang berarti bahwa, persetubuhan merupakan hakikat dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dan persetubuhan dalam rumah tangga

²⁴ Lihat Chairuman, *Hukum*, h. 2.

²⁵ Syarifuddin, *Hukum*, h. 146.

seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga, dalam suatu perkawinan ketika *qabûl* sudah diucapkan, maka sejak saat itu seorang suami istri dihalalkan untuk saling menikmati kesenangan dalam hubungan seksual.

Kehalalan bersetubuh antara suami istri ini merupakan hak bersama diantara keduanya, yang berarti juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh dihindari oleh suami istri atau salah satunya. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ

*“dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela”*²⁶

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

*“istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.”*²⁷

Sedangkan, berdasarkan data yang diperoleh dari mahasiswa UIN Maliki yang menjadi informan dalam penelitian ini, salah satu isi perjanjian dalam perkawinan mereka adalah untuk menanggukkan persetubuhan yang menjadi hakikat dari suatu perkawinan tersebut, sebagaimana disebutkan :

*“Iya ada, perjanjiannya itu belum boleh berhubungan dulu, sama belum dinafkahi”*²⁸

²⁶ QS. Al-Mu'minûn (23) : 5-6. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 342.

²⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 223. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 35.

“Janjinya itu belum tinggal serumah, belum berhubungan dulu, ya semacam penangguhan untuk dukhul gitu”²⁹

Adapun dalam penerapan perjanjian tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka diperoleh keterangan sebagai berikut :

“ternyata ya janjinya itu gag tertepati perjanjian itu. Soalnya kan dulu ya pas sama-sama di Malang, ya sering ketemu. Ketika liburan kalau ada acara mesti (pasti) nginap dirumahnya mas (suami), sering ketemunya gitu, gag bisa akhirnya ternyata. Pokoknya jaraknya setengah tahun, enam bulanan lah udah dilanggar”³⁰

“iya udah melanggar, pokoknya gag ketahuan aja gitu dan gag papa, gag ada konsekuensi apa-apa. Saya kan dikasih tau kakak, kalau kamu melanggar gak apa-apa, tapi jangan sampe ketahuan. Karena dampaknya itu kan hamil kan ya, makanya jangan sampe ketahuan, entah itu hamil atau pas melakukan kayak gitu ketahuan keluarga itu.”³¹

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ulama mengklasifikasikan perjanjian perkawinan kedalam tiga bentuk yaitu perjanjian yang syarat-syaratnya sesuai dengan tujuan pernikahan dan tujuan syariat, perjanjian yang syarat-syaratnya bertentangan dengan tujuan pernikahan dan ketentuan hukum Allah, serta perjanjian yang syarat-syaratnya tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah dan persyaratannya mengandung unsur kemashalahatan bagi salah satu pihak. Maka, dapat disimpulkan berdasarkan konsep fiqh tersebut, perjanjian perkawinan yang isinya berupa penangguhan untuk berhubungan seksual masuk dalam bentuk perjanjian kedua, yakni

²⁸ AU, wawancara (Malang, 24 Desember 2013).

²⁹ Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

³⁰ Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

³¹ AU, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

perjanjian yang isinya bertentangan dengan tujuan pernikahan dan ketentuan hukum Allah.

Hal ini dikarenakan, berdasarkan dalal-dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Mu'minin (23) ayat 5 sampai 6 dan surat Al-Baqarah (2) ayat ke-223 yang telah diuraikan sebelumnya, maka persetubuhan dalam rumah tangga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri, sehingga apabila perjanjian perkawinan itu isinya kebalikan dari apa yang diperintahkan Allah dalam firmanNya, maka perjanjian ini bertentang dengan perintah Allah.

Dalam konsep hukum perjanjian itu sendiri terdapat beberapa asas hukumnya, salah satunya yaitu kebebasan dalam membuat perjanjian, baik asas-asas hukum yang diambil dalam konsep hukum Islam maupun hukum perdata pada umumnya, keduanya sama-sama membahas mengenai asas kebebasan dalam membuat perjanjian ini. Adapun, apabila konsep ini dihubungkan dengan kesepakatan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak maupun orang tua dari suami istri tersebut, maka asas ini sudah diterapkan dalam proses mereka membuat suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur perjanjian yang isinya sebagaimana yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki tersebut sehingga para pihak dalam perjanjian ini bebas untuk membuat perjanjian perkawinan yang mereka inginkan. Akan tetapi, dengan asas yang bersifat masih abstrak, perlu juga melihat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Terdapat tiga syarat suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian yang sah, yaitu tidak menyalahi hukum syariat, harus sama-sama ridho dan berdasarkan

kesepakatan bersama, serta harus jelas dan tidak samar³². Apabila dihubungkan dengan ketiga syarat tersebut, maka perjanjian yang isinya berupa penangguhan untuk berhubungan suami istri tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, karena menyalahi hukum syariat yakni diperintahkan untuk saling menikmati diantara keduanya berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga perjanjian tersebut hukumnya adalah tidak sah sebab mengandung unsur memerintahkan apa yang dilarang Allah dan melarang apa yang diperintahkan-Nya. Oleh karena itu, para ulama sepakat apabila perjanjian perkawinan isinya bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tujuan syariat sehingga syaratnya gugur, dan harus dilanggar.

Berdasarkan konsep fiqh tersebut, maka perjanjian yang telah disepakati tentang penangguhan untuk berhubungan suami istri tersebut dalam penerapannya boleh untuk dilanggar dan tidak memiliki konsekuensi apa-apa terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Meskipun, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji.”³³

Akan tetapi, dalam suatu hadits Rasulullah bersabda bahwa :

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ³⁴

“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”³⁵

³² Sabiq, *Fiqhus*, h. 83.

³³ QS. Al-Mâ'idah (5) : 1. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 106.

³⁴ Muhammad bin Ismail, *Shahîh*, h. 251.

³⁵ Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka dalam penerapannya pun akan berakibat pada dilanggarnya perjanjian itu sendiri.

Pelanggaran ini juga dilakukan karena para informan yang melakukan perjanjian tersebut memahami bahwasannya dalam perkawinan tidak ada pembatasan-pembatasan sebagaimana yang mereka sepakati dalam perjanjian perkawinan mereka. Hal ini sebagaimana diperoleh keterangan dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau masalah melanggar yang seperti itu (berhubungan intim) kan menurut agama kan bebas, aslinya kan gak papa-apa. Kan sudah tau masalah agama juga, gag ada batasan (perjanjian) kayak gini. Ini kan cuma (hanya) apa ya perjanjian antar manusia gitu.”³⁶

Akan tetapi, konsekuensi penting lainnya yang harus dijalankan ketika persetubuhan suami istri telah terjadi adalah dikenakannya kewajiban nafkah kepada suami.

Sebagaimana diketahui, penyerahan seorang istri untuk dapat dinikmati suaminya berimplikasi kepada kewajiban pemberian nafkah kepada istri. Yang apabila dilihat dari informan Halimah dan AU yang perjanjiannya terdapat penangguhan berhubungan suami istri, maka Halimah telah menjalankan sesuai syariat, dikarenakan suaminya telah menanggung nafkah atas istrinya³⁷. Sedangkan, untuk informan berinisial AU yang telah melanggar perjanjian untuk menyetubuhi istrinya, maka kewajiban nafkah juga sudah dikenakan kepadanya³⁸.

³⁶ AU, wawancara (Malang : 18 Januari 2013).

³⁷ Suami dari informan Halimah telah bekerja sebagai pengajar dan pebisnis. Halimah, wawancara, (Malang : 18 Januari 2014).

³⁸ Akan dijelaskan lebih rinci dalam pembahasan selanjutnya.

b. Perjanjian Perkawinan berupa Penangguhan Pemberian Nafkah oleh Suami dalam Kehidupan Berumah Tangga

Setiap akad nikah yang sah, menimbulkan beberapa pengaruh yakni berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Hak-hak dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga yaitu hak bersama, hak suami dan hak istri yang hak-hak tersebut juga merupakan kewajiban bagi pihak yang lainnya, misalnya hak istri berarti menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.

Salah satu hak istri yang menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya yaitu kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Para ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah tersebut. Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban nafkah, antara lain :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”³⁹

Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan para mahasiswa UIN Maliki tersebut adalah perjanjian untuk penangguhan pemberian nafkah kepada istri. Sebagaimana diperoleh data sebagai berikut :

“Iya ada, perjanjiannya itu belum boleh berhubungan dulu, sama belum dinafkahi”⁴⁰

³⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 233. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 37.

“Bojo ku (suamiku) kan belum kerja, jadi khususnya biaya pendidikan itu masih ditanggung sama orang tua. Terus kalau uang makan dan sehari-hari itu, kan sebelumnya belum kerja, tapi masih pancet (tetap) minta ke orang tua gitu lo, semua biaya masih orang tua masing-masing. Biaya pendidikan maupun biaya makannya. Suamiku dibiayai orang tuanya, aku ya masih orang tua ku juga.”⁴¹

Sama halnya dengan kewajiban untuk saling menikmati persetubuhan antara suami istri, nafkah juga merupakan hakikat dalam suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan nafkah merupakan implikasi atas terikatnya seorang istri hanya kepada suami dan menjadi hak milik suami yang berhak menikmatinya selama-lamanya, sehingga berdasarkan kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia diwajibkan untuk memberinya nafkah⁴². Sedangkan, dalam suatu perkawinan tidak mungkin tidak ada persetubuhan didalamnya, oleh karenanya, nafkah ini juga turut menjadi hakikat dalam kehidupan berumah tangga yang harus dijalankan.

Dalam perjanjian perkawinan yang isinya berupa penangguhan pemberian nafkah ini, maka para ulama sepakat bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian ini bertentangan dengan maksud akad dan melanggar hukum Allah beserta syariat-Nya. Oleh karena itu, syarat ini tidak sah dan gugur. Selain itu, perjanjian perkawinan yang disepakati juga tidak memenuhi syarat-syarat umum suatu perjanjian yang dapat dikatakan sah, karena syarat-syarat sahnya perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syariat yang diperintahkan. Dalam hadits Rasulullah disebutkan bahwa :

⁴⁰ AU, wawancara (Malang, 24 Desember 2013).

⁴¹ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

⁴² Sabiq, *Fiqhus*, h. 56-57.

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ⁴³

*“syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”*⁴⁴

Adapun, dalam kehidupan berumah tangga mahasiswa UIN Maliki yang membuat perjanjian penangguhan nafkah tersebut, diperoleh keterangan bahwa perjanjian tersebut tidak sepenuhnya ditaati, bahkan telah dilanggar. Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

*“tapi kan sekarang kerja, jadinya ya kalau dia-nya punya (uang) aku ya dikasih uang juga. Tapi kalau sama-sama lagi kering (tidak punya uang) ya minta lagi ke orang tua, gitu-gitu to’ (saja). Tapi masih lebih sering mintanya kok.”*⁴⁵

Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan hakikat suatu perkawinan ini dibolehkan untuk dilanggar, sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki tersebut. Hal ini dikarenakan syarat dalam perjanjian perkawinan itu telah gugur dan batal dengan sendirinya, sehingga perkawinannya tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syariat, salah satunya yaitu tanggung jawab berupa kewajiban memberikan nafkah. Adapun bagi pelanggar perjanjian tidak diberikan konsekuensi apapun, dikarenakan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukannya tersebut, justru merupakan perbuatan menjalankan perintah Allah.

⁴³ Muhammad bin Ismail, *Shahih*, h. 251.

⁴⁴ Al-Asqalani, *Fathul*, h. 273.

⁴⁵ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

Akan tetapi, yang juga perlu diketahui adalah kewajiban nafkah tersebut dikenakan kepada seorang suami dengan beberapa syarat, yaitu⁴⁶ :

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Istri menyerahkan dirinya kepada suami
- 3) Suaminya dapat menikmati istrinya
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya
- 5) Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Yang berarti bahwa, ketika syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka suami dikenai kewajiban untuk menafkahi istrinya tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, ketiga informan yang terdapat perjanjian untuk penangguhan nafkah dalam perkawinannya yaitu mahasiswa dengan inisial LQ dan AU. Sedangkan, mahasiswa atas nama Nur Halimah tidak mengadakan perjanjian untuk penangguhan nafkah, namun perjanjiannya untuk penangguhan berhubungan suami istri.

Sebagaimana dicermati dari hasil wawancara, bahwa informan dengan inisial LQ mengadakan perjanjian untuk penangguhan nafkah didalam perkawinannya, sedangkan untuk berhubungan suami istri, mereka (LQ dan suaminya) telah melakukannya sebagaimana suami istri pada umumnya, yang berarti bahwa kewajiban nafkah telah dikenakan terhadap suaminya, karena istrinya telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

⁴⁶ Sabiq, *Fiqhus*, h. 57.

Begitu juga halnya dengan informan dengan inisial AU, bahwasannya didalam perkawinannya terdapat perjanjian untuk penangguhan nafkah dan penangguhan untuk berhubungan suami istri. Dalam penerapannya, sebagaimana pembahasan sebelumnya, perjanjian untuk menanggukkan berhubungan suami istri telah dilanggar olehnya. Oleh karena itu, berdasarkan pelanggaran tersebut, sebagaimana juga yang diperintahkan oleh syariat, maka informan AU sudah dikenakan kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini karena istrinya sudah memenuhi persyaratan yang menjadi alasan suaminya diwajibkan untuk menafkahnya.

Kewajiban nafkah ini dikenakan kepada suami yang telah bersenang-senang dengan istrinya. Ukuran pemberian nafkah sendiri menurut pendapat jumhur adalah sesuai kemampuan suami, akan tetapi ketidakmampuan ekonomi tidak dapat meniadakan kewajiban nafkah itu sendiri. Hal ini dikarenakan kemampuan suami tidak menjadi syarat wajibnya nafkah selama sebabnya masih ada, yakni karena sebab persetubuhan tersebut.

c. Perjanjian Perkawinan berupa Penangguhan Tinggal Se-rumah Bagi Suami Istri

Allah mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri. Sebaliknya, Allah juga mewajibkan istri untuk tinggal bersama suaminya di rumah yang ia tinggali⁴⁷. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

⁴⁷ Al-Mashri, *Az-Zawaj*, h. 31.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”⁴⁸

Kewajiban untuk seorang istri serumah dengan suami juga dijelaskan dalam *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq, bahwa istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.⁴⁹

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa UIN Maliki yang ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini, diperoleh data bahwa dalam perkawinan mereka terdapat pembatasan untuk tinggal serumah antara suami istri tersebut, yang kemudian disepakati dalam suatu perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana diperoleh keterangan bahwa :

“Janjinya itu belum boleh tinggal serumah, belum berhubungan dulu, ya semacam penangguhan untuk dukhul gitu”⁵⁰

Akan tetapi, apabila kewajiban seorang istri untuk tinggal serumah melayani suaminya ini dikaitkan dengan konsep fiqh berdasarkan pendapat para ulama, maka terdapat perbedaan pendapat. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa persyaratan untuk tinggal serumah adalah sesuatu yang tidak signifikan dan tidak menyentuh hakikat dari akad itu sendiri.

Namun, pendapat yang *rajih* adalah bahwa syarat-syarat tersebut tergolong sebagai syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan ketentuan hukum dari Allah, sehingga sama halnya dengan perjanjian yang isinya penangguhan

⁴⁸ QS. Ath-Thalaq (65) : 6. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 559.

⁴⁹ Sabiq, *Fiqhus*, h. 56.

⁵⁰ Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

berhubungan suami istri dan penangguhan nafkah, maka perjanjian ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah, serta syarat yang disepakati pun menjadi gugur⁵¹. Sehingga, perjanjian yang memiliki syarat-syarat tersebut pun menjadi gugur dan tidak wajib dipenuhi.

Sejalan dengan hal itu, dalam penerapannya perjanjian untuk penangguhan tinggal serumah dengan suami dalam perkawinan mahasiswa tersebut juga tidak dipenuhi dan telah dilanggar oleh pihak-pihak yang menyepakatinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan sebagai berikut :

*“Ketika liburan kalau ada acara mesti nginap dirumahnya mas, sering ketemunya gitu.”*⁵²

Oleh karena perjanjian tersebut berisi syarat yang bertentangan dengan syariat, maka perjanjian tersebut maupun syaratnya menjadi gugur dan dapat dilanggar sebagaimana suami istri pada umumnya yang tinggal serumah, serta pihak yang melanggar tidak dikenai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, dikarenakan perjanjian itu dianggap tidak ada, sehingga tidak harus dipatuhi dalam penerapannya.

d. Perjanjian Perkawinan berupa Penundaan Memiliki Keturunan

Imam Ghazali berpendapat, bahwa keturunan adalah menjadi haknya bapak saja, baginya mempunyai hak melarangnya jika mau, tanpa seizin istri. Akan tetapi pendapat tersebut dinilai lemah oleh para ulama. Sedangkan mayoritas jumbuh berpendapat bahwa keturunan merupakan hak berserikat antara

⁵¹ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 249.

⁵² Halimah, *wawancara* (Malang : 18 Januari 2014).

suami istri, tidak boleh salah satu dari mereka mencegahnya tanpa izin yang lainnya⁵³.

Sebagaimana yang menjadi tujuan seseorang menikah pada umumnya yaitu ingin memiliki keturunan agar nasab keluarga dapat diteruskan dan tidak terputus. Selain itu juga Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya menjelaskan bahwasannya umatnya yang memiliki banyak keturunan menjadi salah satu alasan dicintai dan dibanggakan oleh Rasulullah, sehingga tidak mengherankan memiliki keturunan menjadi idaman setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Memiliki keturunan menjadi hakikat perkawinan, bahkan tujuan yang paling tinggi dari pernikahan adalah melahirkan anak⁵⁴. Allah berfirman :

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

*“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu”*⁵⁵

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat perjanjian perkawinan untuk menunda memiliki keturunan. Sebagaimana diperoleh keterangan dari proses wawancara sebagai berikut :

*“Bojo ku (suamiku) kan belum kerja, jadi khususnya biaya pendidikan itu masih ditanggung sama orang tua. Terus kalau uang makan dan sehari-hari itu, kan sebelumnya belum kerja, tapi masih pancet (tetap) minta ke orang tua gitu lo, semua biaya masih orang tua masing-masing. Biaya pendidikan maupun biaya makannya. Suamiku dibiayai orang tuanya, aku ya masih orang tua ku juga. Terus yang kedua itu, perjanjiannya gag boleh terlalu cepat punya anak.”*⁵⁶

⁵³ Azzam, *Al-Usroti*, h. 242.

⁵⁴ Azzam, *Al-Usroti*, h. 241.

⁵⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 187. Departemen, *Al-Qur'an*, h. 29.

⁵⁶ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

Penundaan untuk memiliki keturunan tersebut tujuannya untuk mengatur masa yang tepat untuk memiliki anak, dikarenakan suami istri tersebut masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikannya. Penundaan ini berbeda dengan membatasi, akan tetapi hanya mengatur. Oleh karena itu, hal ini tidak diharamkan oleh para ulama, sebab menurut para ulama mengatur masa untuk memiliki keturunan halal sebagaimana dihalalkannya KB yang bertujuan mengatur jarak memiliki keturunan, atau yang biasa disebut dengan istilah تنظيم النسل (mengatur keturunan)⁵⁷. Hal ini berbeda dengan membatasi keturunan atau para ulama menyebutnya dengan تحديد النسل.⁵⁸ Mayoritas ulama berpendapat bahwa upaya untuk membatasi keturunan hukumnya haram, sebagaimana diharamkannya penggunaan KB permanen bagi suami istri (vasektomi/tubektomi).

Apabila ini dikaitkan dengan perjanjian perkawinan, maka pada dasarnya perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan sangat berbeda dengan perjanjian untuk tidak memiliki keturunan. Hal ini dikarenakan dalam kesepakatan untuk penundaan hamil itu ada kemashalahatan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Sedangkan, apabila perjanjian tidak memiliki keturunan maka perjanjian tersebut sudah tentu bertentangan dengan ketentuan hukum Allah, sehingga tergolong sebagai perjanjian yang syaratnya tidak sah. Akan tetapi, apabila perjanjian tersebut isinya hanya berupa penundaan memiliki keturunan maka syarat tersebut tergolong sebagai perjanjian jenis ketiga, yakni perjanjian yang syarat-syaratnya tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah

⁵⁷ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), h. 66.

⁵⁸ Mahjuddin, *Masailul*, h. 66.

dan persyaratan ini mengandung kemashalahatan bagi salah satu pasangan atau bahkan keduanya.

Adapun dalam penerapannya perjanjian perkawinan yang telah disepakati ini dilanggar oleh para pihak yang bersangkutan, hal ini sebagaimana diperoleh keterangan dalam wawancara sebagai berikut :

“Gag boleh terlalu cepat punya anak. Jadinya aku itu harus cepat lulus itu, kan bapakku itu mengutamakan pendidikan, nah sedangkan kemarin aku kan meteng (hamil), terus akhirnya sama bapak ya disuruh ngopeni (dijaga) suamiku, eh ternyata masih belum rezekinya (keguguran).”⁵⁹

Perjanjian penundaan untuk memiliki keturunan tergolong sebagai perjanjian yang tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah. Adapun syarat seperti ini dinilai sah dan pengajuan syarat seperti ini hukumnya mubah, sedangkan pemenuhannya menurut syariat boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan⁶⁰. Namun, menurut ulama Hanabilah perjanjian seperti ini wajib dipenuhi, artinya bahwa suami tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap istri untuk mendapatkan keturunan (senggama), yang jelas-jelas tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati tersebut. Oleh karena itu, jika perjanjian itu dilanggar maka konsekuensinya istri berhak menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan perbedaan pendapat pemenuhan perjanjian perkawinan yang syarat-syaratnya tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah ini, maka penulis melihat hukum pemenuhannya suatu perjanjian yang paling relevan dikenakan sesuai perjanjian perkawinan berupa penundaan memiliki keturunan

⁵⁹ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

⁶⁰ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, h. 246.

adalah hukumnya mubah, yang berarti boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Hal ini karena persoalan anak merupakan rezeki yang diluar batas kemampuan manusia, sehingga apabila sudah diamanahkan oleh Allah maka tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mensyukurinya. Selain itu, dikarenakan apabila perjanjian tersebut dilanggar tidak ada dampak negatif yang dirasakan oleh kedua belah pihak dalam rumah tangganya. Sebab, perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan tersebut merupakan inisiatif dari orang tua dari kedua belah pihak yang menginginkan pendidikan anaknya dapat berjalan lancar. Sehingga, apabila Allah memberikan rezeki berupa keturunan tersebut lebih cepat, tidak ada kerugian yang dirasakan oleh suami istri tersebut, yang ada justru kebahagiaan menyambutnya.

Oleh karena itu, karena hukum pemenuhan perjanjian tersebut adalah mubah, maka meskipun dalam penerapannya perjanjian tersebut dilanggar oleh keduanya, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap keduanya.

3. Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Mahasiswa UIN Maliki Malang.

Asas kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, berimplikasi pada diberikannya kebebasan dan keleluasaan kehendak bagi para pihak untuk membuat perjanjiannya dalam bentuk sebagaimana yang mereka inginkan, yakni berupa perjanjian dengan bentuk yang tertulis atau hanya berupa kesepakatan atau perjanjian yang tidak tertulis⁶¹.

⁶¹ Marbun, *Membuat*, h. 5.

Dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa di UIN Maliki Malang ini misalnya, meskipun kesepakatan mereka dalam melakukan pembatasan-pembatasan sementara dalam suatu perkawinan itu merupakan suatu bentuk perjanjian perkawinan, akan tetapi para pihak yang terlibat didalamnya menginginkan perjanjian yang disepakati tersebut hanya dalam bentuk yang tidak tertulis atau lisan. Hal ini sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan ketika ditanyakan perihal bentuk perjanjian perkawinan tersebut, maka berikut keterangannya :

*“Hanya secara lisan aja kok keluarga kita”*⁶²

*“Gag tertulis. Hanya pembicaraan lisan keluarga.”*⁶³

*“Perjanjian itu dibuat sama orang tuaku, tapi semua secara lisan.”*⁶⁴

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur bahwa setiap perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati harus didaftarkan terlebih dahulu⁶⁵. Hal ini berarti, apabila dilihat dari pasal ini, setiap perjanjian perkawinan yang disepakati dalam suatu perkawinan. Seharusnya didaftarkan ke pegawai pencatat nikah setempat. Hal ini sesuai dengan pengertian perjanjian perkawinan yang didefinisikan oleh Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Munakahat, yakni perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan

⁶² Halimah, wawancara (Malang : 18 Januari 2014).

⁶³ AU, wawancara (Malang : 24 Desember 2013).

⁶⁴ LQ, wawancara (Malang : 23 Desember 2013).

⁶⁵ Lihat Pasal 29 ayat 1 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah⁶⁶.

Perihal pendaftaran perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini secara tidak langsung menginstruksikan agar setiap perjanjian perkawinan yang didaftarkan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang dalam penyelenggaraannya lebih menekankan pada aspek tertib administrasi, sehingga dalam berbagai perangkat ilmu hukum dikenal asas legalitas sebagai asas penting dalam penegakkan hukum di Indonesia. Misalnya, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, maka harus terlebih dulu ada aturan tertulis tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidanakan. Selain itu penerapan asas legalitas juga terdapat dalam hukum administrasi negara, yang mengatur bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan atau kewenangan tertulis yang melekat padanya menurut undang-undang. Aspek tertulis dalam berbagai bidang hukum inilah yang menjadi ciri khas dari penerapan sistem *civil law* di Indonesia. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar setiap perjanjian perkawinan yang disepakati harus tertulis dan didaftarkan ke Pegawai Pencatatan Nikah setempat.

Sedangkan apabila mengkaji kembali kepada asas konsensualisme dalam suatu perjanjian yang dijelaskan dalam kerangka teori sebelumnya, oleh BN. Marbun dalam bukunya *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum* menjelaskan bahwa berbagai ketentuan undang-undang memang pada umumnya

⁶⁶ Ghazaly, *Fiqih*, h. 119.

menetapkan untuk sahnyanya suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis, meskipun demikian ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam suatu Undang-Undang tersebut hanya bersifat opsional saja. Perihal mau menerima atau tidak ketentuan tersebut sudah menjadi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian⁶⁷.

Cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam membuat suatu kesepakatan atau perjanjian yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis dan secara lisan. Tujuannya pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta sebagai alat bukti yang sempurna di saat timbul sengketa di kemudian hari.⁶⁸ Hal ini sejalan sebagaimana diatur dalam KHI yang menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat menjadi alasan bagi istri untuk dapat menggugat cerai.⁶⁹ Oleh karena itu, dalam hukum perkawinan di Indonesia unsur tertulis dan terdaftar-nya suatu perjanjian perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi⁷⁰, dengan tujuan agar perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum serta sebagai alat bukti sempurna ketika nanti timbul sengketa.

Pada dasarnya, setiap perjanjian baik yang tertulis ataupun tidak sifatnya mengikat kepada pihak yang terlibat di dalamnya, hal ini didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yang artinya setiap perjanjian harus ditepati dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi karena asas hukum sifatnya abstrak, sehingga asas ini tidak dapat langsung

⁶⁷ Lihat kembali BN. Marbun, *Membuat*, h. 5.

⁶⁸ <http://seleralelaki08.blogspot.com/2012/05/hukum-perjanjian.html> diakses tanggal 23 Januari 2014.

⁶⁹ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 51.

⁷⁰ Lihat Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkret, dalam hal ini perjanjian perkawinan yang tidak tertulis dan tidak terdaftar⁷¹.

Tentunya perjanjian lisan (tidak tertulis) tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini semakin didukung dengan tidak adanya konsekuensi yang harus dijalankan apabila perjanjian tidak tertulis itu tidak ditaati. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki yang menjadi informan dalam penelitian ini. Perjanjian perkawinan yang telah mereka sepakati dalam penerapannya tidak dipenuhi, bahkan dilanggar secara sadar dan sengaja (sebagaimana dijelaskan pada analisis rumusan masalah sebelumnya).

Oleh karena itu, apabila dilihat dari bentuk perjanjian perkawinan yang disepakati hanya dalam bentuk lisan (tidak tertulis) maka perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena hanya dapat disandarkan pada asas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian yang disepakati mengikat pihak yang terlibat didalamnya sebagaimana undang-undang. Akan tetapi, tidak ada konsekuensi yang harus dijalankan ketika perjanjian itu dilanggar. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun yang perlu ditekankan lagi adalah sifat mengikatnya perjanjian perkawinan ini harus juga dihubungkan dengan isi perjanjian itu sendiri.

Adapun perihal isi perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa UIN Maliki tersebut, tidak diatur secara terperinci baik

⁷¹ Artadi, *Implementasi*, h. 50.

dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan, dalam KHI perjanjian perkawinan yang dibahas adalah tentang taklik talak dan harta bersama. Meskipun demikian, secara umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI memberikan keleluasaan dalam membuat perjanjian perkawinan yang belum diatur dalam kedua instrumen hukum tersebut. Dengan catatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Syarat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam KHI ini yang kemudian akan dapat ditarik kembali kekuatan hukum perjanjian tersebut berdasarkan isinya. Hal ini dikarenakan dari empat macam isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki, tiga diantaranya berdasarkan konsep fiqh bertentangan dengan hukum Islam, karena mengharamkan yang sebenarnya halal. Maka perjanjian tersebut tetap tidak memiliki kekuatan hukum, karena bertentangan dengan hukum Islam yang disyari'atkan berdasarkan nash-nash syar'i.